RENCANA KERJA TAHUN 2021

DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jalan Dewi Sartika No. 45 Kota Palu
Sulawesi Tengah 94121
Email : sulteng.pariwisata@gmail.com , Website : disparekrafsulteng.com

KATA PENGANTAR

Untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), serta untuk melaksanakan pembangunan yang berhasil guna dan berkelanjutan, dibutuhkan keterpaduan, koordinasi dan kebersamaan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Disamping itu, sangat diperlukan sebuah strategi dan mekanisme serta pedoman yang menjadi acuan dalam melaksanakan program-program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 adalah merupakan pedoman atau petunjuk operasional yang akan menjadi acuan bagi pengembangan pariwisata daerah Sulawesi Tengah, khususnya pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021.

Seperti diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata saat ini adalah bagaimana membangun karakter bangsa serta bagaimana setiap warga Negara diberi akses untuk saling memperkenalkan pariwisata. Sejalan dengan tujuan pembangunan Kepariwisataan Nasional, kegiatan pengembangan sektor pariwisata khususnya di Sulawesi Tengah harus mampu memberikan kontribusi terhadap berbagai tantangan era globalisasi dunia melalui usaha peningkatan kualitas produk dan pelayanan sehingga mampu bersaing dengan daerah lain atau bahkan dengan Negara lain. Apabila hal ini dapat diwujudkan, maka penerimaan devisa Negara dan pendapatan daerah dari sektor pariwisata akan dapat memenuhi target yang diharapkan. Oleh karena itu peran pemerintah, swasta dan masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui berbagai kerja sama dan koordinasi yang baik.

Berpedoman pada Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, telah memberikan dampak yang sangat luas terhadap pemerintahan di daerah dimana otonomi yang diberikan merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan pembangunan Kepariwisataan yang tetap memperhatikan kearifan budaya lokal merupakan suatu hal yang mutlak dan sangat urgent.

Karena itu, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pembangunan kepariwisataa perlu dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional.

Untuk mencapai target tersebut, diharapkan kepada semua staf di jajaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah serta semua pihak yang terkait untuk dapat menjadikan **Rencana Kerja (RENJA)** Tahun 2021 ini sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas serta acuan dalam menyusun **Rencana Kerja** Tahun 2022 yang akan datang.

Palu, Januari 2021

KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

I.P.S. I NYOMAN SRIADIJAYA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640919 199003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3. Maksud dan Tujuan 2
1.4. Sistimatika Penyusunan 2

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD (Budpar) Tahun Lalu Dan Capaian Renstra DINAS 4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 8
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 10
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 10
2.5. Penelaahan Usulan Program 12

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 15
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 15
3.2. Tujuan Dan Sasaran RENJA SKPD 17
3.3. Program Dan Kegiatan 17

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah..... 21

BAB V P E N U T U P 27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. OPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja OPD) sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi agar sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan Rencana Kerja yang tertuang dalam Renstra OPD dan mengacu pada RPJMD dan RKPD serta Renja Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan bidang urusan OPD. Sehingga baik program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dapat terintegrasi dan terlaksana dengan baik.

1.2. Landasan Hukum

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
3. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 75 Tahun 2016 tentang Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

a. Sebagai dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode satu tahun anggaran.
b. Sebagai bahan dan dokumen penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 berdasarkan sistimatika berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistimatika Penyusunan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Rencana Tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra OPD Tahun 2020

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan **Rencana Kerja Tahun 2020**, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan **9 Program** dan **18 Kegiatan** dengan total anggaran sebesar ***Rp. 16.519.531.297,85.*** Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut semua yang dapat direalisasikan ***Rp. 15.690.132.545,16*** atau sebesar **94,98*%.***

Pencapaian target kinerja sebagai wujud keberhasilan dalam pembangunan Pariwisata sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Disiplin Aparatur
- Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Peningkatan Kualitas Perencanaan
- Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- Pengembangan Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Industri Pariwisata
- Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan

Dari sasaran yang telah ditetapkan, secara umum semua terlaksana dengan baik sesuai harapan. Kondisi ini menggambarkan keberhasilan pembangunan Kepariwisataan sesuai dengan **VISI yaitu : " Mewujudkan Pesona Wisata Sulawesi Tengah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan".**

Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sulawesi Tengah pada Tahun 2020 berjumlah **11.992** Orang atau turun sebesar **48,34 %** dari tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara ke Sulawesi Tengah pada Tahun 2020 hanya berjumlah **1.812.995** Orang atau turun sebesar **58,67 %** dari tahun sebelumnya*.*

Perbandingan Jumlah Kenaikan Kunjungan Wisatawan

NO.	URAIAN	JUMLAH KUNJUNGAN	
		WISMAN	WISNUS
1.	Tahun 2015	19.677	2.946.885
2.	Tahun 2016	55.795	3.075.984
3.	Tahun 2017	24.709	3.025.417
4.	Tahun 2018	23.942	3.000.166
5.	Tahun 2019	24.660	3.090.171
6.	Tahun 2020	11.992	1.812.995

Penurunan jumlah wisatawan yang sangat signifikan tersebut adalah efek dari penyebaran pandemic virus covid 19 yang melanda seluruh dunia yang pada akhirnya sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat dalam segi pendapatan ekonomi, pemutusan hubungan kerja dan pengangguran yang meningkat dan terhambatnya perkembangan kepariwisataan.

Jumlah pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang diperoleh dari kontribusi pariwisata terhadap PDRB Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO.	PERIODE TAHUN	JUMLAH
1.	2014	Rp. 4.367.792.000,-
2.	2015	Rp. 4.937.198.000,-
3.	2016	Rp. 5.300.525.000,-
4.	2017	Rp. 5.914.567.000,-
5.	2018	Rp. 6.757.940.000,-
6.	2019	Rp. 7.389.000.000,-
7.	2020	Rp. 197.441.000,-

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Dampak dari penurunan jumlah kunjungan wisatawan terlihat juga pada penurunan pendapatan Daerah dari sektor Jasa dan Pelayanan seperti Hotel/Akomodasi, Restoran/Rumah Makan, Tempat Hiburan, Transportasi dan yang terparah adalah dampak langsung yang dirasakan oleh seluruh masyarakat melalui *Multiflier Effect* (Effect Ganda) dari terhambatnya kemajuan pariwisata. Hal ini berpengaruh terhadap faktor keberhasilan dan keterkaitan dengan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tergambar pada Tabel berikut.

TABEL 2.1
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Tahun (n-2)	Realisasi Renja Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	URUSAN : PILIHAN									
	BIDANG URUSAN : PARIWISATA									
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi - perkantoran (%)	100%	98%	80%	94%	94%	100%	90%	90%
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran									
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	90%	90%	83%	83%	99%	95%	95%
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD (%)								
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	70%	90%	90%	99%	99%	99%
	- Peningkatan Disiplin Aparatur									
	4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	80%	87%	87%	100%	83%	83%
	- Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
	5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Program	Tercapainya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	11 dokumen	10 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	88%	11 dokumen	11 dokumen	99%
	- Penyusunan Perencanaa, Monitoring dan Evaluasi Program									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Tahun (n-2)	Realisasi Renja Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Lama tinggal wisatawan (hari)								
	- Perwilayahan dan Investasi Pariwisata	1. Mancanegara	3-5	3-5	3-5	3-5	97%	3-5	3-5	97%
	- Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata	2. Nusantara	4-7	4-7	4-7	4-7		4-7	4-7	
	- Atraksi dan Tata Kelola Destinasi	Pengeluaran harian wisatawan								
		1. Mancanegara (USD/hari)	210	230	250	1.271,5	508%	270	270	100%
		2. Nusantara (Rp/hari)	900000	1.100.000	1.400.000	1.630.552	116%	1.600.000	1.600.000	
	7. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatkan arus kunjungan wisatawan								
	- Pengembangan Segmen Pasar, Personal Bisnis dan Pemerintah	- Jumlah kunjungan Wisman (orang)	18.500	23,942	19.500	24.660	126%	20.000	25.641	128%
	- Analisis Data Pasar dan Pengembangan Komunikasi Kepariwisataan	- Jumlah kunjungan Wisnus (orang)	3.200.000	3.000.166	3.600.000	3.090.171	86%	3.800.000	3.213.177	84%
	- Strategi Pemasaran Pariwisata									
	8. Program Pengembangan Industri Pariwisata	Jumlah investasi dan mitra usaha yang tersertifikasi	125	138	151	185	122%	166	166	100%
	- Kemitraan Usaha Pariwisata									
	- Sertifikasi dan Standar Usaha Pariwisata									
	- Investasi Usaha Pariwisata									
	9. Program Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan	Jumlah SDM Kepariwisatan yang berkualitas	240	320	400	910	227%	460	460	100%
	- Pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Pariwisata									
	- Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan									
	- Pengendalian dan Transformasi Kepariwisataan									

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah pada Pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa Urusan Pemerintahan menjadi kewenangan Dinas adalah sebagian urusan pemerintahan di Bidang Pariwisata.

Mengacu pada Peraturan Gubernur tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tanggung jawab yang besar untuk memajukan bidang pariwisata. Salah satu kunci keberhasilan dan menjadi point penting bagi kemajuan bidang pariwisata adalah ***Pelayanan.***

Pelayanan dapat diberikan secara internal maupun eksternal didalam kantor maupun diluar kantor. Khusus dalam bidang kepariwisataan, jasa pelayanan akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang ada. Oleh karena itu kinerja pelayanan Dinas terutama untuk melakukan pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia bidang pariwisata perlu terus dilakukan baik kepada aparatur maupun kepada Mitra Usaha yang bergerak dalam Industri Pariwisata, serta masyarakat di lingkungan Daya Tarik Wisata (DTW).

Tingkat kualitas pelayanan bidang pariwisata menjadi indikator keberhasilan Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals*) yang juga seirama dengan sasaran pembangunan pariwisata yaitu ***Pro Job*** (penyediaan lapangan kerja), ***Pro Poor*** (pengentasan Kemiskinan), ***Pro Growth*** (pertumbuhan ekonomi) dan ***Pro Environment*** (pelestarian lingkungan). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini.

TABEL 2.2
ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	I K K	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI	CATATAN ANALISA
				TAHUN (thn n-4)	TAHUN (thn n-3)	TAHUN (thn n-2)	TAHUN (thn n-1)	TAHUN (thn n)	TAHUN (thn n-4)	TAHUN (thn n-3)	TAHUN (thn n-2)	TAHUN (thn n-1)	TAHUN (thn n)	
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan		Kunjungan wisatawan											
	- Wisatawan Mancanegara			18.500	19.000	19.500	20,000	21.500	24.709	23.942	24.660	**11.921**	21.500	
	- Wisatawan Nusantara			3.200.000	3.450.000	3.600.000	3.800.000	4.000.000	3.025.417	3.000.166	3.090.171	**1.812.995**	4.000.000	
2	- Lama tinggal wisatawan (hari/orang)		Kontribusi sektor											
	1. Mancanegara		pariwisata terhadap	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	**1- 2**	3-5	
	2. Nusantara		PDRB	4-7	4-7	4-7	4-7	4-7	4-7	4-7	4-7	**1- 2**	4-7	
	- Pengeluaran Wisatawan Harian													
	1. Mancanegara (USD/hari)			210	230	250	270	290	200	210	230	**144,38**	290	
	2. Nusantara (Rp/hari)			900.000	1.100.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	700.000	900.000	1.100.000	**855.615**	1.800.000	
3	Kualitas investasi mitra usaha yang tersertifikasi		Investasi dan mitra usaha yang tersertifikasi	125	138	151	166	182	125	138	185	**90**	182	
4	Kualitas pelayanan bidang pariwisata		SDM Kepariwisataan yang berkualitas	240	320	400	460	540	240	320	910	**50**	540	

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan kondisi realitas yang ada sampai pada awal Tahun 2021, ada beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian khusus dalam kaitannya dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata yaitu :

- Pandemi Covid 19 yang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun sejak pertama merebak di Indonesia pada awal tahun 2020 lalu. Kondisi ini berdampak sangat besar terhadap kepariwisataan secara nasional. Pendapatan dari sektor Pariwisata menurun drastis. Hotel, restoran, travel agent banyal yang tidak dapat beroperasi lagi, yang berimbas terhadap pengurangan karyawan. Angka pengangguran dan kemiskinan pun meningkat. Menghadapi situasi ini, Dinas Pariwisata harus segera menyesuaikan dengan mengadakan kegiatan dan program yang sifatnya dapat mendorong terciptanya kreasi dan kreatifitas masyarakat ditengah pandemi agar dapat bertahan dan membuat roda ekonomi tetap berputar.
- Perlunya keberlanjutan program untuk memulihkan, membenahi dan memajukan kembali sektor Pariwisata Sulawesi Tengah khususnya di daerah yang terdampak bencana langsung pada obyek/destinasi wisata.
- Situasi keamanan yang sudah mulai kondusif pasca bencana menjadi modal dasar dan peluang untuk membangun kembali kepariwisataan di daerah ini.
- Peningkatan promosi beberapa kawasan dan objek wisata yang tersebar di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah seperti Taman Nasional Lore Lindu Sigi, Kawasan Kep.Togean Tojo Una-Una, Danau Poso, Tanjung Karang Donggala, Wisata Paralayang Matantimali Sigi, Pulau Sombori Morowali, Pulo Dua Banggai.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 pada Matriks Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tercantum beberapa indikator Program dan Kegiatan yang menjadi target capaian pada tahun anggaran 2021 yang akan datang.

Untuk mencapai target dari indikator program dan kegiatan tersebut telah direncanakan dukungan pembiayaan sebesar ***Rp.21.916.430.003,-*** untuk membiayai seluruh program dan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk detil program dan kegiatan berikut rencana anggarannya pada masing – masing bidang Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021

NAMA SKPD : DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					NO.	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
I.	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Kab./ Kota / Luar Daerah			**Rp 13.410.401.176**	**I.**	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Kab./ Kota / Luar Daerah			**Rp 15.863.548.648**	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	Rp 1.115.107.200	1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	Rp 1.033.279.225	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	Rp 9.022.290.903	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	Rp 8.607.993.753	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			100%	Rp 69.999.975	3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			100%	Rp 69.999.975	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	Rp 178.214.936	4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	Rp 159.436.936	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	Rp 552.787.184	5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	Rp 372.445.864	
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	Rp 1.287.396.242	6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	Rp 3.634.647.940	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	Rp 518.594.736	7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	Rp 601.405.638	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	Rp 666.010.000	8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	Rp 1.384.339.317	
II.	**PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Kab./ Kota / Luar Daerah	Lama tinggal wisatawan (hari) 1. Mancanegara 2. Nusantara Pengeluaran harian wisatawan	3-5 4-7	**Rp 2.063.000.000**	**II.**	**PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Kab./ Kota / Luar Daerah	Lama tinggal wisatawan (hari) 1. Mancanegara 2. Nusantara Pengeluaran harian wisatawan	3-5 4-7	**Rp 1.666.074.355**	
1.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				Rp 328.097.925	1.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				Rp 87.489.340	
2.	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				Rp 410.830.000	2.	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				Rp 174.807.840	
3.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		1. Mancanegara (USD/hari)	290	Rp 742.410.075	3.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		1. Mancanegara (USD/hari)	290	Rp 1.252.786.175	
4.	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata LIntas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		2. Nusantara (Rp/hari)	1.800.000	Rp 581.662.000	4.	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata LIntas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		2. Nusantara (Rp/hari)	1.800.000	Rp 150.991.000	
III.	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Kab./ Kota / Luar Daerah	Meningkatkan arus kunjungan wisatawan - Jumlah kunjungan Wisman (orang) - Jumlah kunjungan Wisnus (orang)	21.500 4.000.000	**Rp 1.150.000.000**	**III.**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Kab./ Kota / Luar Daerah	Meningkatkan arus kunjungan wisatawan - Jumlah kunjungan Wisman (orang) - Jumlah kunjungan Wisnus (orang)	21.500 4.000.000	**Rp 1.310.950.000**	
1.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik , Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				Rp 1.150.000.000	1.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik , Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				Rp 1.310.950.000	
IV.	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Kab./ Kota / Luar Daerah	Jumlah investasi dan mitra usaha yang tersertifikasi	182	**Rp 889.920.000**	**IV.**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Kab./ Kota / Luar Daerah	Jumlah Investasi dan Mitra Usaha yang tersertifikasi	182	**Rp 1.495.857.000**	
1.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif				Rp 889.920.000	1.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif				Rp 1.495.857.000	
V.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Kab./ Kota / Luar Daerah	Jumlah SDM Kepariwisatan yang berkualitas	540	**Rp 1.400.000.000**	**V.**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Kab./ Kota / Luar Daerah	Jumlah SDM Kepariwisataan yang berkualitas	540	**Rp 1.580.000.000**	
1.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan				Rp 1.400.000.000	1.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan				Rp 1.580.000.000	
					Rp 18.913.321.176						**Rp 21.916.430.003**	

2.5. Penelaahan Usulan Program

Untuk mencapai sasaran jangka pendek dalam pembangunan Sulawesi Tengah, pada Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan **5 Program** dan **15 Kegiatan**. Semua program dan kegiatan yang sudah ditetapkan didukung dengan pembiayaan yang dialokasikan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pariwisata Tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.5
PENELAAHAN USULAN PROGRAM

NAMA SKPD : DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME		CATATAN
I.	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Kab./ Kota / Luar Daerah	Persentase peningkatan mutu pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	**Rp**	**15.863.548.648**	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp	1.033.279.225	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Rp	8.607.993.753	
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur yang dilaksanakan	Rp	69.999.975	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp	159.436.936	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase peningkatan Disiplin	Rp	372.445.864	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Aparatur	Rp	3.634.647.940	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	601.405.638	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp	1.384.339.317	
II	**PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Kab./ Kota / Luar Daerah	Lama tinggal wisatawan (hari) 1. Mancanegara 2. Nusantara Pengeluaran harian wisatawan 1. Mancanegara (USD/hari) 2. Nusantara (Rp/hari)	**Rp**	**1.666.074.355**	
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi			Rp	87.489.340	
2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			Rp	174.807.840	
3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			Rp	1.252.786.175	
4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata LIntas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Rp	150.991.000	

III	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Kab./	Meningkatkan arus kunjungan	**Rp**	**1.310.950.000**	
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota /	wisatawan	Rp	1.310.950.000	
	Daya Tarik , Destinasi dan Kawasan Strategis	Luar	- Jumlah kunjungan Wisman (orang)			
	Pariwisata Provinsi	Daerah	- Jumlah kunjungan Wisnus (orang)			
IV	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI**	Kab./	Jumlah investasi dan mitra usaha	**Rp**	**1.495.857.000**	
	KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN	Kota /	yang tersertifikasi			
	PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN	Luar				
	INTELEKTUAL	Daerah				
1.	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			Rp	1.495.857.000	
V	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**		Jumlah SDM Kepariwisatan yang	**Rp**	**1.580.000.000**	
1	**PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Kab./	berkualitas			
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber	Kota /		Rp	1.580.000.000	
	Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Luar				
	Tingkat Lanjutan	Daerah				
			J U M L A H		**21.916.430.003**	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 telah ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional yaitu :

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. SDM berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Sedangkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di Tahun 2021 adalah ***Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di berbagai wilayah didukung oleh SDM dan Infrastruktur untuk pertumbuhan berkualitas.***

Untuk mendukung langsung Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, akan diprioritaskan beberapa *Major Project*, antara lain :

1. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas yaitu : Danau Toba, Bororbudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung dan Morotai
2. 9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter
3. Industri 4.0 di 5 sub sektor prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi.
4. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
5. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

Sejalan dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pariwisata telah menindaklanjuti dengan ditetapkannya Kawasan Pariwisata Provinsi dan Destinasi Pariwisata Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana yang tertuang dalam PERDA Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2019-2034. Di tengah pandemic covid 19 yang masih melanda dunia, Pemerintah tetap mendorong sektor pariwisata agar tetap bertahan dan eksis. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyiapkan berbagai kebijakan, salah satunya lewat dana hibah pariwisata.

Dana hibah ini digunakan untuk program peningkatan implementasi CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, Environment Friendly) guna meningkatkan kesiapan daerah dan industri pariwisata. Program tersebut bertujuan sebagai inisiasi adaptasi dengan kondisi new normal di sektor pariwisata, mengacu kepada protokol kesehatan, konsep pembangunan kepariwisataan berkelanjutan dan Sapta Pesona yang merupakan jiwa pariwisata Indonesia.

Penerapan CHSE akan meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi dan industri pariwisata Indonesia sepanjang pandemic covid 19, dengan meningkatkan peran pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menangani dan meningkatkan kebersihan, keindahan, kesehatan, dan keamanan masyarakat di destinasi wisata. Melibatkan para tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif serta masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 secara ekonomi di sekitar lokasi destinasi wisata. Beberapa bentuk kegiatan program ini, antara lain bersih-bersih, penataan, serta penyemprotan desinfektan di destinasi wisata.

Berdasarkan panduan dari Organisasi Pariwisata Dunia UNWTO (United Nations World Tourism Organization) negara-negara yang selama ini menggantungkan pendapatan melalui sektor pariwisata harus mulai mengembangkan visi pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism). Hal ini penting karena destinasi wisata yang mengembangkan visi ini dianggap mampu terus berlanjut meskipun ada tantangan, tak terkecuali di saat pandemi. Dengan demikian pariwisata Indonesia diharapkan dapat terus bertahan, pulih dan bangkit kembali sesuai dengan 4 (empat) pilar Pembangunan Pariwisata Nasional yang telah ditetapkan Pemerintah yaitu :

1. Destinasi Pariwisata yang meliputi : pembangunan daya tarik wisata/atraksi, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, pembangunan fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat.
2. Industri Pariwisata yang meliputi : pembangunan struktur industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

3. Pemasaran Pariwisata yang meliputi : pengembangan pasar wisatawan, pengembangan citra pariwisata, pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata, pengembangan promosi pariwisata.
4. Kelembagaan Pariwisata yang meliputi : pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 adalah untuk menyamakan persepsi sekaligus untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan dalam berbagai program dan kegiatan.

Sasaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

- Menyediakan data dan informasi guna menjadi dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.
- Menyiapkan pedoman atau petunjuk operasional yang akan menjadi acuan bagi pengembangan kepariwisataan daerah Sulawesi Tengah Tahun 2021.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Kepariwisataan Tahun 2021 telah ditetapkan **5 Program** dan **15 Kegiatan** yaitu sebagai berikut :

1. PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
c. Adminstrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

2. PROGRAM: PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Kegiatan :
a. Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi;
b. Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
c. Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi;
d. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Kab/Kota dalam Satu Daerah Provinsi.

3. PROGRAM: PEMASARAN PARIWISATA

Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.

4. PROGRAM: PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kegiatan : Penyedia Sarana dan Prasarana Kota Kreatif.

5. PROGRAM: PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan.

Semua program dan kegiatan yang sudah ditetapkan didukung dengan pembiayaan yang dialokasikan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kepariwisataan Tahun 2021 , sebagaimana tercantum pada Tabel berikut.

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022

NAMA SKPD : DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Kab./ Kota / Luar Daerah		**Rp 15.863.548.648**	APBD			**Rp 17.449.903.513**
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	Rp 1.033.279.225			100%	Rp 1.136.607.148
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	Rp 8.607.993.753			100%	Rp 9.468.793.128
	3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			100%	Rp 69.999.975			100%	Rp 76.999.973
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	Rp 159.436.936			100%	Rp 175.380.630
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	Rp 372.445.864			100%	Rp 409.690.450
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	Rp 3.634.647.940			100%	Rp 3.998.112.734
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	Rp 601.405.638			100%	Rp 661.546.202
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	Rp 1.384.339.317			100%	Rp 1.522.773.249
	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Lama tinggal wisatawan (hari)	Kab./ Kota / Luar Daerah		**Rp 1.666.074.355**	APBD			**Rp 1.832.681.791**
	1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1. Mancanegara		3-5				3-5	
	2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2. Nusantara		4-7	Rp 87.489.340			4-7	Rp 96.238.274
	3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				Rp 174.807.840				Rp 192.288.624
	4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pengeluaran harian wisatawan							
		1. Mancanegara (USD/hari)		290	Rp 1.252.786.175			319	Rp 1.378.064.793
		2. Nusantara (Rp/hari)		1.800.000	Rp 150.991.000			1.980.000	Rp 166.090.100

	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatkan arus kunjungan	Kab./		**Rp**	**1.310.950.000**	APBD			**Rp** **1.442.045.000**
	1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	wisatawan	Kota /		Rp	1.310.950.000				Rp 1.442.045.000
	Daya Tarik , Destinasi dan Kawasan Strategis	- Jumlah kunjungan Wisman (orang)	Luar	21.500					23.650	
	Pariwisata Provinsi	- Jumlah kunjungan Wisnus (orang)	Daerah	4.000.000					4.400.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI	Jumlah investasi dan mitra usaha	Kab./	182	**Rp**	**1.495.857.000**	APBD		200	**Rp** **1.645.442.700**
	KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN	yang tersertifikasi	Kota /							
	PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN		Luar							
	INTELEKTUAL		Daerah							
	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif				Rp	1.495.857.000				Rp 1.645.442.700
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	Jumlah SDM Kepariwisatan yang	Kab./	540	**Rp**	**1.580.000.000**	APBD		594	**Rp** **1.738.000.000**
	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	berkualitas	Kota /							
	1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber		Luar		Rp	1.580.000.000				Rp 1.738.000.000
	Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Daerah							
	Tingkat Lanjutan									
			J U M L A H		**Rp**	**21.916.430.003**	**J U M L A H**			**Rp** **24.108.073.003**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

a. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2021 akan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
   d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. **PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**
   a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
   b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
   c. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
   d. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3. **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**
   a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.
4. **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**
   a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
5. **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**
   a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2021

NO	URUSAN, PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)	PERKIRAAN MAJU		PERANGKAT DAERAH
					TOLOK UKUR	TARGET		TARGET	KEUANGAN	
	URUSAN : PARIWISATA									Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
I.	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**Kab./Kota/ Luar Daerah**			**Rp 15.863.548.648**		**Rp 17.449.903.513**	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100%	Rp 1.033.279.225	100%	Rp 1.136.607.148	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100%	Rp 8.607.993.753	100%	Rp 9.468.793.128	
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah					100%	Rp 69.999.975	100%	Rp 76.999.973	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					100%	Rp 159.436.936	100%	Rp 175.380.630	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah					100%	Rp 372.445.864	100%	Rp 409.690.450	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100%	Rp 3.634.647.940	100%	Rp 3.998.112.734	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%	Rp 601.405.638	100%	Rp 661.546.202	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100%	Rp 1.384.339.317	100%	Rp 1.522.773.249	
II	**PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**		**Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pariwisata dalam mendukung daya tarik Obyek Wisata**	**Kab./ Kota / Luar Daerah**	**Lama Tinggal Wisatawan** **1). Mancanegara (Hari / Orang)** **2). Nusantara (Hari / Orang)** **Pengeluaran Wisatawan Harian** **1). Mancanegara (USD / Hari)** **2). Nusantara (Rp / Hari**	**3 - 7 Hari / Orang** **4 - 7 Hari / Orang** **290 USD/Hari** **Rp. 1.800.000/Hari**	**Rp 1.666.074.355**	**3 - 7 Hari / Orang** **4 - 7 Hari / Orang** **319 USD/Hari** **Rp. 1.980.000/Hari**	**Rp 1.832.681.791**	
	1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		Meningkatnya Sarana Pendukung di DTW Unggulan Provinsi		Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata di DTW Unggulan	45 alat kebersihan yaitu 9 jenis barang masing masing 5 alat di TNLL	Rp 25.802.840		Rp 28.383.124	
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata		Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata	1 dokumen	Rp 61.686.500		Rp 67.855.150	
	2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah Sarana dan Prasarana di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	45 alat Kebersihan yaitu 9 jenis barang masing masing 5 alat di KSPN Togean	Rp 163.807.840		Rp 180.188.624	
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan		Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 dokumen	Rp 11.000.000		Rp 12.100.000	

			Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi							
	3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Provinsi		Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	1. Taman Nasional Lore Lindu 2. Kepulauan Togean	Rp 19.894.000		Rp 21.883.400	
			Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	3 Dokumen	Rp 306.600.000		Rp 337.260.000	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana di Destinasi Pariwisata Provinsi		Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata	1 kegiatan	Rp 11.870.000		Rp 13.057.000	
			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana di Destinasi Pariwisata Provinsi		Jumlah Sarana dan Prasarana di destinasi Pariwisata provinsi	8 Kegiatan / paket pekerjaan	Rp 757.314.900		Rp 833.046.390	
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata		Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata	1 dokumen	Rp 37.710.000		Rp 41.481.000	
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Pelatihan Peran POKDARWIS dalam Pengembangan DTW	50 orang	Rp 119.397.275		Rp 131.337.003	
	4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Tersedianya Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi		Pelatihan layanan penyediaan TDUP	40 orang	Rp 63.343.000		Rp 69.677.300	
			Terkelolanya Investasi Pariwisata dengan baik		Terlaksananya Kegiatan Coaching Clinic	40 orang	Rp 87.648.000		Rp 96.412.800	

III	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		**Meningkatnya jumlah dan lama tinggal Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara secara bertahap**	**Kab./ Kota / Luar Daerah**	**- Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara** **- Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara**	**21.500 Orang** **4.000.000 Orang**	**Rp 1.310.950.000**	**23. 650 Orang** **4.400.000 Orang**	**Rp 1.442.045.000**	
	1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik , Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Meningkatnya Jumlah Orang Yang Mengetahui Pariwisata Sulawesi Tengah (Viewer)		Pembuatan Video Produk Paket WIsata	4 Kabupaten	Rp 280.800.000		Rp 308.880.000	
	Tersedianya Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri		Terlaksananya Promosi Pemasaran Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri		Promosi/Pameran Pariwisata	1 Kegiatan	Rp 300.000.000		Rp 330.000.000	
	Meningkatnya Kerjasama dan Transaksi Mitra Pariwisata		Tersedianya Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri		Penyusunan Buku Profil dan Analisis Kunjungan Wisatawan	13 Kab/Kota	Rp 50.000.000		Rp 55.000.000	
	Meningkatnya Kerjasama dan Transaksi Mitra Pariwisata		Meningkatnya Kerjasama dan Transaksi Mitra Pariwisata		1. Pelaksanaan Kegiatan Central Sulawesi Comfort Journey Travel and Creative Industri Fair. 2. Pelaksanaan Kegiatan Central Sulawesi Sport Tourism 3. Pelaksanaan Kegiatan Gathering Pemasaran Pariwisata INTIM	3 Kegiatan	Rp 680.150.000		Rp 748.165.000	
IV	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**		**Meningkatnya Investasi Mitra Usaha yang tersertifikasi**	**Kab./ Kota / Luar Daerah**	**Jumlah Investasi dan Mitra Usaha yang Tersertifikasi**	**182**	**Rp 1.495.857.000**	**200**	**Rp 1.645.442.700**	
	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Meningkatnya Sarana dan Prasaranan Industri Kreatif dan layanan penyediaan sarana prasarana kota kreatif		Pelatihan Industri Kreatif dan Forkom Mitra Usaha Pariwisata serta bantuan alat alat kesenian	60 orang dan 2 Sanggar seni	Rp 695.857.000		Rp 765.442.700	

			Meningkatnya Perluasaan pasar domestik melalui sentra sentra industri kreatif dan mendorong meningkatnya sentra inovasi ekonomi kreatif dan inkubator		Pelatihan Penyusunan Paket Perjalanan Wisata	80 orang	Rp 200.000.000		Rp 220.000.000	
			Meningkatnya Kolaborasi dan jejaring usaha kreatif		Pelatihan/Sosialisasi pelaku usaha industri terhadap pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif	30 orang	Rp 100.000.000		Rp 110.000.000	
			Meningkatnya Usaha Kreatif bagi Usaha Pemula		Pelatihan Pengembangan Ekraf terhadap industri pemula dan menengah	70 Orang	Rp 200.000.000		Rp 220.000.000	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata		Pelatihan/Sosialisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Ekraf	110 orang	Rp 300.000.000		Rp 330.000.000	
V	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**		**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Pariwisata**		**Jumlah SDM Kepariwisataan yang Berkualitas**	**540**	**Rp 1.580.000.000**	**594**	**Rp 1.738.000.000**	
	1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan									
			Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Pelatihan Houskeeping	50 orang	Rp 110.722.250		Rp 121.794.475	
			Tercapainya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Pelatihan/Sosialisasi CHSE	30 orang	Rp 225.469.000		Rp 248.015.900	
			Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan		Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih Berbasis Kompetensi Pemandu Wisata(Tour Guide) dan Pemandu Wisata Arung Jeram	65 orang	Rp 344.999.000		Rp 379.498.900	

			Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Bidang Pariwisata	35 orang	Rp 103.979.500		Rp 114.377.450	
			Terlaksananya Pelatihan Asesor Kompetensi / Work Place Assesor (WPA)		Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	20 orang	Rp 266.803.700		Rp 293.484.070	
			Terlaksananya Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata		Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Pariwisata	1 lembaga	Rp 162.151.400		Rp 178.366.540	
			Terlaksananya Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif		Pelatihan/Workshop Desain Grafis	35 orang	Rp 259.286.150		Rp 285.214.765	
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Jumlah Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif yang berkompetensi	35 orang	Rp 106.589.000		Rp 117.247.900	
						JUMLAH	**Rp 21.916.430.003**	**JUMLAH**	**Rp 24.108.073.003**	

BAB V

P E N U T U P

a. Beberapa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu :

a. Pandemi Covid-19 telah menciptakan perubahan baru yang sangat signifikan dalam pariwisata dunia, di mana wisatawan harus mempertimbangkan aspek kesehatan dan kebersihan ketika berwisata.
b. Pemerintah harus menghadirkan kebijakan–kebijakan baru terkait percepatan pemulihan pariwisata serta melakukan pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut.
c. Para pelaku industri pariwisata harus menyesuaikan dengan apa yang disebut sebagai berwisata di era new normal dengan penerapan standard global dalam pelayanan kesehatan dan kebersihan bagi wisatawan.

b. Rencana Tindak Lanjut

Meskipun pandemic virus covid 19 masih melanda, tetapi Visi dan Misi Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Tengah harus tetap menjadi tujuan, maka diperlukan adanya kesamaan langkah dan persepsi yang dituangkan dalam sebuah Rencana Tindak Lanjut (*Action Plan*) antara lain :

1. Perlu dilaksanakan Sosialisasi Program tentang penerapan Standar Protokol Kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, Environment Friendly). CHSE adalah standar kesehatan yang harus diterapkan di seluruh tempat pariwisata, agar perekonomian Indonesia tetap berputar.
2. Untuk memastikan implementasi protokol CHSE dilaksanakan pelaku usaha, Kemenparekraf juga telah meluncurkan sertifikasi CHSE, berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta industri agar penerapan sertifikasi ini dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif.
3. Pemberian stimulus atau insentif bagi para pelaku pariwisata agar terus ditingkatkan untuk mendorong kebangkitan usaha pariwisata .
4. Pariwisata yang dikembangkan haruslah pariwisata yang berkelanjutan, ini diharapkan akan menjadi sebuah tanggung jawab sosial bersama antara wisatawan dengan penduduk lokal dalam hal protokol kesehatan yang secara konsisten dijalankan dan bisa memberikan manfaat ekonomi untuk daerah di sekitar obyek wisata.
5. Menggalang kerja sama dan keterpaduan lintas sektor baik ditingkat lokal, regional dan nasional dalam upaya memulihkan dan membangkitkan kembali geliat pariwisata saat pandemic maupun pasca pandemic nanti.